



## PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANIK PRASTYORINI, SST

Jabatan : ANALIS KEBIJAKAN MUDA (KETUA TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER),

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RELITA WULANDARI, S.Sos

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN HAK ANAK,

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 10 November 2023

Pihak Kedua,

RELITA WULANDARI, S.Sos  
NIP 196904131996022003

Pihak Pertama,

ANIK PRASTYORINI, SST  
NIP 198001312005012007

**PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Perangkat Daerah Pengarusutamaan Gender.	Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi aspek pengarusutamaan gender	58 Perangkat Daerah
2	Meningkatnya Pendampingan Dan Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi.	Jumlah Lembaga/Organisasi Wanita yang dilakukan pendampingan dan advokasi	32 Lembaga/Organisasi Wanita
3	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga/Organisasi Wanita yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan perempuan	32 Lembaga/Organisasi Wanita
4	Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3 Dokumen